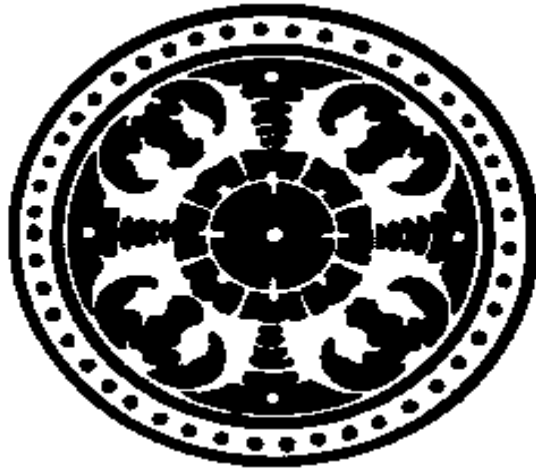


POLITIK DALAM PERSPEKTIF HINDU



Disusun oleh,

Dr. Drs. I Wayan Surpa, SH., Msi
196012281983041001

UPT.PENDIDIKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
UNIVERSITAS UDAYANA
2015

Bab I

Pendahuluan

Politik selalu diidentikkan dengan kepentingan. Sayangnya dalam perjalanan kehidupan politik,kepentingan mengalami penyempitan makna sebatas kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka yang berpolitik pun lebih sering lebih sering mengabaikan nilai moral dan etika yang digariskan oleh ajaran agama. Bahkan, agama sering jadi alat untuk kepentingan politik. Ketika ada lampu hijau yang mempersilahkan umat Hindu berpolitik, tidak sedikit yang kurang sepaham dengan hal tersebut.

Ketika kepentingan yang menjadi tujuan,apapun yang menghalangi tujuan tersebut dianggap sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Politik dalam konteks berbangsa dan bernegara sesungguhnya memiliki makna sebagai sebuah jalan atau cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam agama Hindu,berpolitik untuk tujuan mulia ini dikenal dalam Dharma agama dan Dharma Negara.

Dharma Agama adalah hukum, tugas, hak dan kewajiban setiap orang untuk tunduk dan patuh melaksanakan agama. Yang dimaksud dharma Negara adalah hukum, tugas, hak dan kewajiban setiap orang untuk tunduk dan patuh kepada Negara, termasuk dalam pengertian yang seluas-luasnya. Ini ditegaskan dalam kitab suci Atharwa Weda,Reg Weda,dan Yayur Weda. Dharma negaralah yang sering diidentikkan dengan kehidupan berpolitik, tetapi dalam arti yang luas tentunya. Dharma Negara memiliki pengertian sebagai kewajiban setiap umat Hindu untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Jadi dalam agama Hindu, politik itu harus memiliki tujuan yang baik tanpa harus mementingkan kepentingan pribadi saja tapi lebih mengutamakan kepentingan rakyat demi tercapainya kesejahteraan rakyat.

Bab II

ISI

A. Politik ditinjau dari teori Mahatma Gandhi

Anggapan politik itu tabu dan tidak layak untuk dilakukan, pelaku politik semata-mata untuk mempertahankan kekuatan, kekuasaan, dan kepentingan pribadinya yang bertentangan dengan ajaran agama, hingga muncul tindakan seperti :

- Menggunakan politik sebagai senjata untuk saling menjatuhkan, saling menjelekkkan.
- Pemahaman yang dangkal tentang peran dan kedudukan pendidikan politik
- Menghindari kesalahan tafsir terhadap system pendidikan politik agama Hindu terutama pemikiran Mahatma Gandhi yang sesungguhnya sangat luhur, dan banyak mengandung nilai sraddha dan bhakti.
- Timbul pandangan bahwa politik hanya dimiliki oleh sejumlah elit yang berada dalam kondisi tertentu.

Ajaran Mahatma Gandhi ; satya, ahimsa, brahmacarya, aparigraha, asteya, penguasaan lidah, nirbaya, enggan bersentuhan, karya pangan, toleransi, rendah hati, arti sumpah yadnya, dan swadeshi. Politik diartikan sebuah proses melawan napsu dalam diri barulah memulai untuk melawan musuh-musuh tanpa perlawanan fisik dengan kejujuran dan pantang keduniawian, proses untuk membebaskan diri dari belenggu kebutuhan diri sendiri, kebebasan, freedom, perjuangkan rakyat tertindas, mempertahankan keselarasan nilai-nilai agama, tanpa kekerasan, memperjuangkan kebenaran dengan kebenaran, memperoleh ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkat, jenjang dan umur peserta didik.

Kontribusi ajaran Gandhi terhadap pendidikan Hindu adalah dalam bidang tatasusila, dia sangat menekan terbentuknya moral dari anak-anak bangsa. Dalam bidang hukum Hindu dan kewarganegaraan beliau memberikan tehnik persidangan, cara menjalankan hukum yang baik. Dalam bidang filsafat agama, Gandhi memberikan sebuah eksperimen dengan dirinya sendiri dijadikan sebagai lading eksperimennya itu.

Tak dipungkiri proses demokrasi ini membawa dampak yang lumayan banyak bagi proses kehidupan bernegara umat Hindu. Proses ini tentu sebuah kewajiban dharma Negara umat dalam mengawal proses kenegaraan yang diyakini tak lepas dari tuntunan politik. Artinya,kepentingan umat Hindu nasional dapat diperjuangkan melalui jalur-jalur politik. Untuk itu infrastruktur dan penguasaan beberapa elemen

strategis sangat penting, salah satunya adalah legislative baik kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Untuk itu semakin banyak umat Hindu menduduki posisi-posisi legislative tersebut, tentu akan semakin baik pula kepentingan umat Hindu ter-aspirasikan di Pemerintahan.

Politis Hindu yang mencalonkan diri di beberapa daerah dari berbagai partai politik tentu tidak lepas dari harapan kepada umat Hindu itu sendiri sebagai pemilihnya. Disinilah pendidikan politik dan kedewasaan politik umat Hindu diperlukan. Artinya juga harus ada koordinasi dan paradigma yang baik sehingga tidak terjadi eksploitasi kepentingan baik bagi sang calon maupun umat sebagai pemilih.

Masyarakat tentu dapat dengan cermat memperhatikannya, agar suara tidak sia-sia begitu saja. Sebuah ikatan relasional akan terbangun bila sang calon menyadari arti pentingnya politik dan konstituen yang ia wakili. Memberikan kontribusi bagi pembangunan umat Hindu melalui pola keterwakilan dalam Pemerintahan.

B. Politik dalam kajian Niti sastra

Niti Sastra berasal dari kata Niti dan Sastra. Kata Niti yang berasal dari bahasa sansekerta "Ni" dan "Ktin" berarti "to lead", memimpin. "Kamus kecil Sansekerta - Indonesia (Tim pemda Bali,1982/1989 : 128) menjelaskan bahwa kata "Ni" berarti "memantun atau memimpin atau hal memimpin". Juga diartikan sebagai "politik dan Sosial etik,pertimbangan atau kebijaksanaan. Sedangkan buku Teach yourself Sanskrit (Coulson,2003 : 411) mengartikan kata "Ni" sebagai "lead" atau "guide" sedangkan "Niti" diberi arti sebagai "Conduet, Policy dan political science". Sementara itu kamus Jawa kuno - Indonesia (Zoet mulder,1997:707-708) menjelaskan arti kata "Niti" sebagai "cara bekerja atau menjalankan yang betul/baik/benar atau bijaksana". Juga diartikan sebagai "ilmu tata Negara atau politik", kebijaksanaan politik. Bahkan diartikan juga sebagai "kebijaksanaan duniawi". Selanjutnya kata "nitisastra" diberi arti "ilmu mengenai etika politik".

Niti sastra sebagai ilmu politik mengikuti pengertian kata Niti termaksud di atas, maka tidaklah mengherankan jika banyak orang yang mengartikan Niti Sastra itu sebagai ilmu politik. Menurut Drs.I Gusti Made Ngurah dalam bukunya berjudul "Buku Pendidikan Agama Hindu Untuk perguruan Tinggi" (1998: 193-194) kata Niti berarti kebijaksanaan duniawi,etika social,politik,tuntunan dan ilmu pengetahuan tentang Negara atau ilmu politik berdasarkan ajaran Agama Hindu. Dalam pengertiannya yang lebih luas,kata Niti Sastra diartikan sebagai ilmu yang bertujuan untuk membangun suatu Negara, baik dari segi tata Negara, tata Pemerintahan maupun tata

kemasyarakatan. Niti Sastra lalu diberi makna sebagai konsep peraturan Pemerintahan dan pembangunan Negara pada umumnya.

C. Politik ditinjau dari Teori Kepemimpinan Hindu

Antara politik dan kepemimpinan merupakan sebuah mata uang yang tak dapat dipisahkan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memberikan tauladan, selalu mengusahakan kesejahteraan rakyat, dan menghindari kesenangan pribadi. Dalam Kautilya Arthashastra dijelaskan pula bahwa "apa yang menjadikan Raja senang bukanlah kesejahteraan, tapi yang membuat rakyat sejahtera itulah kesenangan seorang Raja". Kalimat ini menunjukkan bahwa sasaran pokok dalam politik Hindu adalah kebahagiaan rakyat, bukanlah kesejahteraan penguasanya karena penguasa yang berhasil membawa rakyatnya pada kebahagiaan tertinggi, kemuliaan adalah pasti.

Dalam ajaran Agama Hindu banyak sekali ditemukan ajaran tentang kepemimpinan. Ia tersebar mulai dari Weda sampai pada berbagai sastra Hindu. Dalam kitab Atharwa Veda (3.4.1) dijelaskan tentang tugas seorang pemimpin sebagai berikut : Wahai pemimpin Negara, datanglah dengan cahaya, lindungilah rakyat dengan penuh kehormatan, hadirlah sebagai pemimpin yang utama , seluruh penjurur memanggil dan memohon perlindunganmu, raihlah kehormatan dan pujian dalam Negara ini. Disamping sebagai pelindung rakyat, pemimpin juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

D. Politik Dalam Kajian Agama Hindu

Seperti kita saksikan diberbagai media baik cetak maupun elektronik, banyak pakar dan elit politik menyampaikan bahwa tahun 2009, akan diruihkan dengan berbagai agenda politik dalam ajang pemilihan umum (pemilu) legislatif (DPR, DPRD, DPD) yang disusul dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tak heran lantas banyak kalangan menyebut tahun 2009 ini sebagai tahun politik. Tahun dimana akan terjadi integrasi antara berbagai kepentingan baik kelompok maupun kepentingan bangsa dan negara.

Kita pun selalu disajikan dengan berbagai adegan politik melalui berbagai keputusan yang fenomenal ditengah mepetnya waktu penyelenggaraan pemilu yang tinggal

beberapa bulan lagi. Misalnya saja keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Hasilnya penetapan anggota legislatif untuk Pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.

Keputusan itu tentu dapat mendorong proses demokrasi yang substansi ditengah banyaknya keraguan kepada partai politik. Sang calon legislatif (caleg) pun didorong bekerja lebih giat untuk memperoleh suara dari pemilih. Sebuah proses demokrasi yang mulai terbuka ditengah pendidikan politik yang belum begitu baik. Kalau ini dapat berjalan baik, artinya para elit partai dapat menerima dengan lapang dada dan melaksanakan keputusan ini dengan bijak, politik di tanah air ini dapat dicapai dengan baik pula.

Pendidikan Politik

Tak dipungkiri proses demokrasi ini membawa dampak yang lumayan banyak bagi proses kehidupan bernegara umat Hindu. Proses ini tentu sebuah kewajiban dharma negara umat dalam mengawal proses kenegaraan yang diyakini tak lepas dari tuntutan politik. Artinya, kepentingan umat Hindu nasional dapat diperjuangkan melalui jalur-jalur politik. Untuk itu infrastruktur dan penguasaan beberapa elemen strategis sangat penting, salah satunya adalah legislatif baik kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. Untuk itu semakin banyak umat Hindu menduduki posisi-posisi legislatif tersebut, tentu akan semakin baik pula kepentingan umat Hindu ter-aspirasikan di pemerintahan.

Masalahnya kemudian adalah pada proses pencapaian posisi legislatif yaitu untuk menduduki kursi dewan perwakilan rakyat (DPR). Politisi Hindu yang mencalonkan diri di beberapa daerah dari berbagai partai politik tentu tidak lepas dari harapan kepada umat Hindu itu sendiri sebagai pemilihnya. Disinilah pendidikan politik dan kedewasaan politik umat Hindu diperlukan. Artinya juga harus ada koordinasi dan paradigma yang baik sehingga tidak terjadi eksploitasi kepentingan baik bagi sang calon maupun umat sebagai pemilih.

Dalam UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik dijelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,

dari definisi itu dapat kita tangkap bahwa harus ada sebuah pemahaman antara pemilih dan yang akan dipilih (caleg) dalam suatu visi yang sama.

Dari kesemuanya itu, adakah sebuah proses pendidikan yang sudah dilakukan sang calon ? atau hanya sebuah retorika pencitraan yang melupakan proses pendidikan politik.

Beberapa hal yang harus dicermati adalah track record dari sang calon, yang tentu terkait dengan latar belakangnya. Tak sedikit juga para calon yang selalu mengumbar janji dalam komunikasi politik yang dilakukan. Ada keselarasan antara pendidikan politik yang belum baik ditutupi dengan kemasan kampanye super baik sehingga tertanam (positioning) citra produk politik yang baik.

Dengan ramainya hiruk pikuk pasar politik saat ini, sungguh sangat sulit membedakan antara kampanye politik dan kampanye pemilu. Menurut Firmanzah dalam bukunya *Marketing Politik*, antara pemahaman dan realitas, menjelaskan harus ada redefinisi kampanye. kedua hal ini memiliki perspektif yang berbeda. Misalnya dari tujuannya, kampanye pemilu cenderung menggiring pemilih ke blik suara, sedangkan kampanye politik lebih menitik beratkan pada image politik. Begitu juga dari strategi yang dilakukan, kampanye pemilu untuk melakukan mobilisasi dan berburu pendukung (push-marketing), sedangkan kampanye politik untuk membangun dan membentuk reputasi politik (pull-marketing). Nah, tentu kampanye politik memerlukan waktu yang cukup panjang, sedangkan kampanye pemilu cenderung jangka pendek, sesuai kebutuhan. Dari sinilah dapat dibaca track record sang calon legislatif maupun partai politik mengingat setiap aktivitas partai politik selalu menjadi perhatian masyarakat.

Masyarakat tentu dapat dengan cermat memperhatikannya, agar suara tidak sia-sia begitu saja. Sebuah ikatan relasional akan terbangun bila sang calon menyadari arti pentingnya politik dan konstituen yang ia wakili. Memberikan kontribusi bagi pembangunan umat Hindu melalui pola keterwakilan dalam pemerintahan.

Kondisi ideal ini sangat sulit dicapai karena berbagai hal, salah satunya adalah masih lemahnya infrastruktur umat Hindu. Salah satu indikatornya adalah dapat dilihat dari organisasi massa berbasis Hindu. Prajaniti Indonesia yang memang didedikasikan untuk mengakomodir kepentingan dan perjuangan politik umat Hindu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara organisasi lainnya memiliki fokus dan ladang garapan yang berbeda seperti Peradaha Indonesia, lebih fokus pada pembinaan para

pemuda, KMHDI lebih fokus pada kaderisasi para kader mahasiswa. Pun WHDI yang menaungi kegiatan wanita Hindu Indonesia.

Al hasil Parisada, sebagai majelis tertinggi terkadang tak luput harus mengakomodir dan melakukan 'regulator' berbagai kepentingan politik umat. Dalam arti Parisada pun harus menampung berbagai keluhan politik umat, belum lagi masalah pembinaan umat. Akhirnya majelis kita memikul beban masalah yang begitu berat. Selanjutnya patut juga dipertanyakan, kemana Prajaniti Indonesia yang seharusnya dapat lebih maksimal berperan sebagai 'regulator' perjuangan dan kepentingan politik umat Hindu ?

BAB III

Penutup

Kesimpulan :

Jadi dalam agama Hindu, politik itu harus memiliki tujuan yang baik tanpa harus mementingkan kepentingan pribadi saja tapi lebih mengutamakan kepentingan rakyat demi tercapainya kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Niti Sastra, Drs. KM. SUHARDANA.
- Buku Agama Hindu, Paramita-Surabaya.
- <http://www.google.com>

